

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)

Masita Hi. Modim (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Samsu Alam (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Muh. Rusli (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: masitamodim@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of local governments in establishing community empowerment through the development of tourism in the district. West Halmahera and to determine the factors that affect the government's role in the creation-empowerment of communities through tourism development. The role of local government West Halmahera, in empowering communities through tourism development through the optimization of tourism information, optimization of attractions, community mobilization and management optimization tourism management. Factors that influence air in empowering communities through tourism development Panorama Disa Beach district. Sahu Halmahera district Barata among others, the promotional aspects and facets of society. Factors funding for tourism development is still minimal and do not yet have comprehensive guidelines.

Keywords: *empowering, tourism, optimization*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kab. Halmahera Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat, dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dilakukan melalui optimalisasi informasi pariwisata, optimalisasi objek wisata, mobilisasi masyarakat dan optimalisasi manajemen pengelolaan pariwisata. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata Panorama Pantai Disa Kec. Sahu kabupaten Halmahera Barat yaitu antara lain aspek promosi dan aspek masyarakat. Faktor dana untuk pengembangan pariwisata masih minim dan belum memiliki pedoman yang komprehensif.

Kata kunci: *pemberdayaan, pariwisata, optimilisasi*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bengen, 2001). Luas wilayah perairan Indonesia se-besar 5,8 juta

km² yang terdiri dari 3,1 juta km² Perairan Nusantara dan 2,7 km² Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia. Besarnya potensi sumberdaya kelautan Indonesia tersebut, potensi sumberdaya ikan laut di seluruh perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun,

tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Budiharsono S., 2001). Di lain sisi, jumlah penduduk yang meningkat cepat beserta intensitas pembangunannya, sumber daya alam di daratan sudah mulai menipis dan dengan kenyataan bahwa 60 % dari penduduk Indonesia (kira-kira 185 juta jiwa) yang dianggap tinggal di daerah pesisir, tidaklah mengherankan bahwa lingkungan pesisir dan laut menjadi pusat pemanfaatan sekaligus pengrusakan yang tingkatnya sudah cukup parah untuk beberapa daerah tertentu (Anonymous, 1996).

Sebagai negara yang terdiri atas kepulauan terbesar di dunia, pastinya pelayanan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah yang ada di Indonesia sangat memiliki banyak kendala, yang berefek kepada disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, endahnya kualitas hidup masyarakat, dan minimnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan lambannya angka kesejahteraan masyarakat. Maka dengan itu, untuk mentaktisi seperti yang disebutkan di atas, maka pemerintah pusat mengambil sebuah kebijakan yang dikenal dengan Otonomi Daerah.

Dalam otonomi daerah yang terdiri atas UU no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, sebagai onsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah

berkewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sejalan dengan hal di atas, dalam ketetapan MPR No. IV. Tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (1999:23) menetapkan bahwa:

“Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisiplin dan partisipator dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, agronomis, social budaya, hemat energy, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan”.

Jadi pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir maupun batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kekayaan wilayah nusantara sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kepariwisataan merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang cukup potensial, yang mampu mendatangkan devisa yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu konsentrasi penuh dari pemerintah pusat, guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama didaerah yang memiliki potensi pariwisata, sehingga dapat dikelola semaksimal mungkin. Dengan demikian, sektor kepariwisataan merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah terutama dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Untuk merealisasikan semua itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang kepariwisataan, seperti yang tercantum di dalam Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 1999 (1999:23) yang menyebutkan bahwa :

“Menjadikan kesenian dan kebudayaan nasional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antara bangsa”

Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendukung dunia kepariwisataan, maka tentunya akan memberikan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan dunia kepariwisataan di Indonesia, khususnya bagi daerah yang memiliki sejumlah potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, maka dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melakukan pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis masyarakat, serta memberikan perlindungan kelestarian sumber hayati kepariwisataan. Sehingga tujuan pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja produktifitas serta mempertahankan sumber daya alam dalam lingkup wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Namun dalam upaya pemanfaatan potensi, terkadang muncul permasalahan yang berakar dari adanya kesenjangan kondisi lingkungan dan sistem sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai perencana, pelaksana, dan pengontrol dalam sebuah kebijakan daerah diharapkan mampu menganalisis dan memetakan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dalam mengeluarkan kebijakannya tidak terkesan sepihak, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, dalam hal penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Untuk itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas berupa pemberian kemudahan, bantuan dan dorongan kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, sangat diharapkan daerah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi dan mengelola sumber-sumber yang berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena besar kecilnya pendapat daerah sangat berefek kepada keberhasilan pelaksanaan otonomi tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang pada hakekatnya memberikan kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah

Berdasarkan UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah dan juga tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Maka salah satu sektor yang potensial adalah pariwisata, yang kiranya dapat menjadi aset bagi peningkatan pendapatan daerah, yang berujung kepada keber-

hasilan pemerintah daerah merealisasikan otonomi daerah, yang ditandai dengan terciptanya kesejahteraan yang merata didalam masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang realistis dan logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan diantaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, toko cinderamata serta meningkatnya pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya "juga" ada hal-hal yang berdampak negatif.

Beberapa kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata seperti: mengencangkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru terutama di wilayah timur Indonesia, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang kepariwisataan dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan (Hari Karyono ; 1997 ; 90).

Sejalan dengan yang dijelaskan di atas, Kabupaten Halmahera Barat, Prov, Maluku Utara, sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam obyek wisata yang kaya dan berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka pengembangan pariwisatanya berjalan kurang baik. Selain memiliki obyek wisata pantai, ada terdapat obyek-obyek wisata lainnya dan untuk saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat (MMC 10/12/2003) secara bertahap berusaha mengembangkan obyek wisata di Kepulauan Halmahera Barat dengan memberikan berbagai sarana-sarana penunjang agar dapat menarik jumlah kunjungan wisata baik dari dalam maupun luar negeri.

Kawasan wisata di Kabupaten Halmahera Barat di anggap sangatlah cukup potensial

dan belum mendapat ekspos secara penuh. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat, potensi wisata yang ada di Kab. Halmahera Barat (HALBAR) sangat memiliki daya tarik tinggi, karena menjadi obyek wisata yang sangat di minati oleh masyarakat daerah setempat maupun masyarakat dari daerah lain, untuk itu sangat penting untuk dilakukan studi bagi kemungkinan pengembangannya.

Pemerintah Daerah Halmahera Barat secara umum masih memiliki hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan- pengembangan pariwisatanya seperti: Panorama Alam, Puncak Gunung Gamkonora Kecamatan Ibu; Sumber Air Panas di Kecamatan Jailolo; Air terjun Goal dan Talaga Rano di Kecamatan Sahu; Air Terjun Tetala di Kecamatan Loloda; Panorama Pantai Idam Dahe di Kecamatan Sahu; Pulau Tahofa dan Pulau Dodengo di Kecamatan Ibu; Panorama dan Pantai Disa di Kec. Sahu

Selain itu, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat pula obyek wisata flora dan fauna seperti: Burung Bidadari, Burung Maleo, Burung Nuri dan Burung Kaka Tua dan beragam obyek wisata budaya yang diperagakan diantaranya: Rumah Adat, Tari-Tarian Daerah, Misalnya tari Kabata, Tari Moro-Moro, Tari Taula Hulo, Tarian Legu dan Salai.

Melihat banyaknya potensi pariwisata yang terdapat di Kab. Halmahera Barat (HALBAR), Prov. Maluku Utara, seperti yang digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Halmahera Barat. Khususnya Pantai Disa, di Kec. Sahu.

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu bahan yang menarik untuk di angkat menjadi bahan penelitian dengan judul :

"Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan

Pariwisata Panorama Pantai Disa, di Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)''

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan dibagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Indonesia dan khususnya pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Barat. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara atau daerah.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial. Sebenarnya pembangunan pariwisata merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TALC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkemu-

nikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,.

Dari hasil observasi mengenai pengembangan pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melibatkan masyarakat lokal untuk melakukan sosialisasi atau periklanan dalam skala terbatas, dalam kondisi ini pemerintah mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinas mengatakan bahwa: "pengembangan pariwisata panorama pantai Disa, Kec. Sahu di kabupaten Halmahera Barat dilakukan melalui promosi berupa festival Budaya dan festival Panorama Pantai Disa setiap tahun yang sudah diagendakan selain itu juga telah diadakan bimbingan teknis sebanyak tiga (3) kali kepada masyarakat setempat".

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melakukan beberapa langkah-langkah melalui pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut: a) Keuntungan penggunaan internet adalah ketersediaan selama 24 jam, tidak mengenal lelah serta adanya jaminan privasi. Pencarian informasi yang sangat cepat dan mudah dapat dilakukan dengan fasilitas search engine, serta adanya direktori internet secara online. Dengan sekian banyak fasilitas, tentunya informasi khususnya tentang pariwisata akan dapat diakses dan disebarluaskan dengan sangat cepat dibandingkan dengan mencari informasi di media cetak atau dari mulut ke mulut. Tentunya hal ini akan dapat berjalan kalau memang tersedia data tentang produk

pariwisata yang sudah tersusun rapi dan terstruktur di dalamnya, karena internet hanyalah merupakan sarana komunikasi saja; b) Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat khususnya Panorama Pantai Disa, di Kec. Sahu, dihadapkan pada berbagai permasalahan, tantangan, peluang dan juga hambatan baik berskala global maupun nasional dan lokal. Seringkali dinyatakan, bahwa pariwisata berperan penting sebagai penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu Negara, namun pada kenyataannya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas.

Kawasan wisata Panorama Pantai Disa Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat di anggap sangatlah cukup potensial dan belum mendapat ekspos secara penuh.

Kawasan wisata ini, menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat memiliki daya tarik karena menjadi obyek wisata daerah dan sangat menarik untuk dilakukan studi bagi kemungkinan pengembangannya.

Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam obyek wisata yang kaya dan berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka dari itu pengembangan pariwisata berjalan kurang baik. Selain memiliki obyek wisata pantai, ada terdapat obyek-obyek wisata lainnya dan untuk saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat (MMC 10/12/2003) secara bertahap berusaha mengembangkan obyek wisata di Kepulauan Halmahera Barat dengan memberikan berbagai sarana-sarana penunjang agar dapat menarik jumlah kunjungan wisata baik dari dalam maupun luar negeri.

Pertumbuhan Industri pariwisata di Halmahera Barat, beberapa dekade ini terasa berjalan di tempat. Penanganan yang semrawut ditengarai sebagai biang keladi semakin lemahnya daya saing industri pariwisata Halbar dibanding dengan sektor lainnya. Meskipun begitu dari data PDRB ta-

hun 2011 industri pariwisata masih menempati peringkat dua. Dengan banyaknya keindahan alam yang belum diolah dengan baik, tentu saja Industri pariwisata masih memiliki potensi yang lebih kuat untuk melampaui sektor lainnya sebagai sektor utama unggulan Halmahera Barat. Dengan segala keunggulan dan kompetensi Halmahera Barat dalam menyediakan daya tarik wisata yang gejalanya secara global memperlihatkan kembali ke alam (*back to nature*), sebuah peluang terbentang dihadapan kita bersama. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah mengolah dan memanfaatkan keindahan alam yang terbentang agar tidak sia-sia.

KESIMPULAN

Peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, khususnya Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu dilakukan melalui: a). Optimalisasi Informasi Pariwisata; belum maksimal karena promosi baru dilaksanakan melalui seni budaya, festival lokal dan serta melalui sim yang belum efektif; b). Optimalisasi Objek Wisata; pembangunan Pariwisata Khususnya Panorama Pantai Disa Kec. Sahu Kabupaten Halmahera Barat dihadapkan pada berbagai permasalahan, tantangan, peluang dan juga hambatan baik berskala global maupun nasional dan lokal. Seringkali dinyatakan, bahwa pariwisata berperan penting sebagai penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu negara, namun pada kenyataannya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas; c). Mobilisasi Masyarakat; kurangnya apresiasi pemerintah terhadap peran serta masyarakat, dimana masyarakat lokal serta pengusaha kecil menengah belum dimaksimalkan terlibat sebagai pelaku industri usaha jasa pariwisata.; d). Optimalisasi manajemen pengelolaan pariwisata; penanganan pariwisata yang bersifat

dinamis, multidimensional dan kompleks belum didukung/berlandaskan kesamaan visi oleh aparat pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota), kalangan industri pariwisata dan masyarakat, menyebabkan timbulnya egoisme sektoral, kesalahan pemahaman terhadap substansi inti.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata Panorama Pantai Disa Kec. Sahu kabupaten Halmahera Barat yaitu antara lain aspek promosi dan aspek masyarakat. Promosi selama ini dilakukan tidak terarah & tidak fokus disebabkan oleh faktor dana untuk pengembangan pariwisata masih minim. Belum dimilikinya pedoman yang komprehensif dalam upaya pengembangan strategi/program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik dilihat dari aspek kriteria, konsep model (karakteristik daerah) maupun pedoman, mencakup: produk, market, pedoman, pelatihan SDM dan perencanaan bisnis (*statement operational prosedur*) menyebabkan tersendatnya upaya peningkatan peran serta masyarakat di bidang pariwisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melakukan beberapa langkah-langkah melalui pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut: Optimalisasi Informasi Pariwisata, optimalisasi objek wisata, mobilisasi masyarakat, optimalisasi manajemen pengelolaan pariwisata.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kab. Halmahera Barat: aspek promosi dan aspek masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Budianto, 2002. *Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Obyek Wisata*, Skripsi, AMPD, Yogyakarta.
- Buchari, Alma. 1992. *Dasar-dasar Bisnis dan Pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- David, Mario. 2002. Skripsi. *Staregi Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Gitosudarmo,, Indriyo. 1994. *Majamen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hadari, H.M, 1990. *Administrasi Personal Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung.
- Islami, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Karryono, A. Hari, 1997. *Kepariwisataan I (Mengurai tentang istilah-istilah pariwisata sampai dengan definisi serta kebijaksanaan kinerja)*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Ketaya, Hermawan. 1994. *Manajemen Publik Relation*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.
- Kusmayadi & Sugiarto, 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy, J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya.
- Nugroho, Adi. 2002. *Prilaku Konsumen*. Jakarta: Studia Press.
- Oka, A. Yoeti. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa; Bandung.
- . 1997. *Promosi Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, L. Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik. (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekadijo. R. G. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Gramedia Pustaka Utama; Bandung.
- Suhartono Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta. Andi Offset.
- Swasta, Basu dan Irawan. 1985. *Manajemen Pemasaran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- . 1992. *Asas-asas Marketing*. Jakarta: Balai Pustaka.
- T. Jiptono, Fandy. 1995. *Strategi Pemasaran*. Bandung: Andi Offset.
- Winardi, 1992. *Promosi dan Reklame*. Bandung: Mandar Maju.
- . 1993. *Asas-asas Marketing*. Bandung: Edisi 2, Mandar Maju.
- . 1994. *Bauran Pemasaran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wijaya Kasali. 1993. *Hubungan antara Promosi dan Penjualan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- <http://www.halbarkab.go.id>
- UU RI No. 9 Tahun 1990. *Tentang Kepariwisataan*.
- UU RI No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
- UU RI No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- Mari Bagun Maluku Utara, *Dinas Pariwisata Propinsi Maluku Utara*.
- Potensi Wisata Maluku Utara*, 2008.